

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini telah dilakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji mengenai peran perempuan dalam pemberdayaan, salah satunya adalah:

Eli yuliawati (2012) dengan judul “Pemberdayaan kaum perempuan dalam menunjang peningkatan pendapatan keluarga melalui *home industry* studi di Dusun Pelemadu, Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul”. Menghasilkan kesimpulan bahwa bentuk kegiatan pemberdayaan yang diberikan oleh PKPEK (Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan) dan PNM ( PT. Permodalan Nasional Mandiri) dalam hal pengembangan *home industry* di Desa Sriharjo, cukup membantu masyarakat dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Selain itu adanya perubahan pendapatan dari hasil *home industry* dalam menunjang peningkatan pendapatan keluarga sebelum dan sesudah adanya kegiatan tersebut, masyarakat Desa Sriharjo sangat terbantu dengan adanya kegiatan pemberdayaan yang diberikan oleh PKPEK dan PNM terbukti kaum perempuan yang ikut dalam kegiatan pemberdayaan mampu membantu perekonomian keluarga<sup>6</sup>

Adapun adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, adalah bahwa penelitian terdahulu lebih memfokuskan

---

<sup>6</sup> Eli Yuliawati, 2012, *Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Menunjang Pendapatan Keluarga Melalui Home Industry*. Yogyakarta; Universitas Negeri Yogyakarta

penelitian mengenai cara pendampingan dan cara mengelola kegiatan home industry di Desa Sriharjo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti hanya ingin mengetahui bentuk penguatan sosial ekonomi masyarakat serta bagaimana terbentuknya kegiatan tersebut, sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang akan dikaji sesuai dengan bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

## **B. Konsep Penguatan Ekonomi**

Pemberdayaan merupakan istilah yang cukup populer sejak gelombang reformasi mulai berjalan, istilah pemberdayaan sering dipakai untuk menggantikan pembangunan masyarakat yang dirasa mengalami distorsi (perbedaan) pemaknaan karena dalam prakteknya proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan tidak semua memberikan daya (kekuatan) bagi masyarakat untuk lebih berkembang. Bahkan sebaliknya kelompok masyarakat yang menjadi tergantung dan semakin tidak berdaya.

Menurut Bookman dan Morgan, pemberdayaan mengacu pada usaha untuk menumbuhkan keinginan pada seseorang untuk mengaktualisasikan diri, melakukan mobilisasi ke atas, serta memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang merasa berdaya.

Dalam prakteknya, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga cara:

*Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakekat diri kemandirian dan keberdayaan masyarakat adalah munculnya keyakinan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi

kemandirian tiap individu perlu diperdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat.

*Kedua*, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah yang nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan pengembangan usaha ekonomi serta pemasaran bagi masyarakat Desa.

*Ketiga*, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak imbang dan eksploitasi atas yang lemah. Memahami pemberdayaan dalam konteks seperti tersebut di atas, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat petani adalah dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan sesuai juga dengan iklim usaha yang berkembang di masing-masing daerah.

Dalam pemberdayaan masyarakat ada beberapa keterkaitan konsep yang perlu dipelajari lebih dalam, agar suatu kegiatan dapat terlaksana dengan benar, antara lain :

### 1. *Social Development* ( Pembangunan Sosial )

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia<sup>7</sup>. Pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara), merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan nasional mencakup upaya peningkatan semua segi kehidupan bangsa, dapat berupa pembangunan aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, dan dapat pula berupa pengembangan ideologi.

Dalam kaitan dengan pembangunan secara umum, maupun pembangunan sosial (*Social Development*) secara khusus. Perkembangan pendekatan pembangunan pada dunia internasional juga mempengaruhi perkembangan pembangunan di Indonesia, baik dalam kerangka pemikiran maupun pendekatannya. Pembahasan perkembangan pendekatan pembangunan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari bahasa isu-isu makro yang terkait dengan intervensi makro dalam bidang pendidikan Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dalam kaitan dengan pembangunan sosial, Kesejahteraan Sosial baik sebagai suatu keadaan, ilmu, kegiatan ataupun gerakan sangatlah terkait hubungannya. Sebagai suatu keadaan (*kondisi*), Kesejahteraan Sosial merupakan sasaran jangka panjang dari upaya pembangunan sosial. Sedangkan Kesejahteraan Sosial sebagai suatu ilmu, atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama Ilmu Kesejahteraan Sosial,

---

<sup>7</sup> Drs. Agnes Sunartiningsih, 2004, *Pemberdayaan masyarakat desa*, Yogyakarta; Universitas Gajah Mada, hal: 71

dapat memberikan sumbangan terhadap upaya penciptaan Kesejahteraan Sosial ataupun peningkatan taraf hidup individu keluarga ataupun masyarakat, yang pada intinya merupakan upaya pembangunan sosial. Sebagai suatu gerakan, Kesejahteraan Sosial mewujudkan diri antara lain dalam bentuk organisasi pelayanan masyarakat ( *Human service Organizations*) yang mengembangkan berbagai bentuk pelayanan sosial (*Social service*) dan usaha Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Services*), baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Sebagai suatu kegiatan, Kesejahteraan mewujudkan diri sebagai usaha Kesejahteraan Sosial yang dikembangkan untuk membantu, mengembangkan, dan mendukung terciptanya peningkatan taraf hidup individu, keluarga maupun masyarakat. Kesejahteraan Sosial baik sebagai gerakan maupun kegiatan merupakan upaya pembangunan sosial, karena inti dari pembangunan yang dilakukan adalah mengembangkan ataupun membangun masyarakat sebagai suatu institusi sosial, termasuk unit-unit di dalamnya, seperti keluarga dan individu, dan bukan sekedar menekankan pada aspek pembangunan fisik.

Terkait dengan istilah ‘Pembangunan Sosial’, Midgley (1995) mendefinikan pembangunan sosial sebagai: (Suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan sosial ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi). Sedangkan bila dilihat strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat mengemukakan ada tiga (3) strategi besar pembangunan sosial, yaitu <sup>8</sup>:

---

<sup>8</sup> Harry hikmat, 2006, *Strategi pemberdayaan masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama presss, hal: 64

- a. Pembangunan Sosial melalui individu (*Social Development by Individualis*), dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini lebih mengarah pada pendekatan individualis.
- b. Pembangunan Sosial melalui komunitas (*Social Development by Communities*), dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitas.
- c. Pembangunan Sosial melalui pemerintah (*Social Development by Government*), dimana pembangunan sosial dilakukan dilembaga di dalam organisasi pemerintah (*Government Agencies*). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis.

Terkait dengan upaya pembangunan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, haruslah disadari bahwa pembangunan sosial tidak harus dikembangkan tanpa melibatkan aspek pembangunan fisik. Upaya pembangunan sosial yang telah disinggung secara singkat di atas pada dasarnya merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat. Bagi seorang pelaku perubahan, hal yang dilakukan terhadap klien mereka (baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok, maupun komunitas) adalah upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

Tujuan dari pembangunan sosial adalah pengembangan dan peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat ( *promotion of social welfare* ) Kesejahteraan Sosial yang dimaksud oleh *Midgley* adalah Kesejahteraan Sosial sebagai suatu

kondisi sosial dan bukan sekedar kegiatan amal ataupun bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai suatu kondisi (keadaan), Kesejahteraan Sosial dapat dilihat dari tiga unsur utamanya, yaitu (a) tindakan (derajat) sampai dimana permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat dikelola, (b) sampai beberapa banyak kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, (c) sampai sekarang besar kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperluas pada berbagai lapisan masyarakat.

## 2. *Social Empowering* (Pemberdayaan Sosial)

Konsep pemberdayaan masyarakat dan penerapannya telah menyebar luas di Utara dan selatan dalam konteks kemiskinan, populasi, dan reformasi sosial. (Donnison, 1993) mengemukakan bahwa kita hidup pada masa ketakutan. Sementara itu, negara-negara makmur di Barat menyatakan bahwa sejumlah besar orang tidak terpakai akibat resesi ekonomi dan restrukturisasi. Mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sangat dilematis, dibayar dengan upah yang sangat murah atau menjadi pengangguran dalam jangka waktu yang lama.

Pandangan yang lebih jelas dikemukakan oleh McArdle (1989) bahwa hal terpenting dalam pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pola demikian sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan, di antara banyak pilihan yang ada di masyarakat. Namun demikian, pada kenyataannya seluruhnya dikerjakan oleh nama profesional atas nama pemberdayaan. Oleh karena itu, banyak kritikan yang diarahkan terhadap pendekatan pemberdayaan ini. Seluruh pelaksanaanya berada di bawah pengawasan profesional yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan masyarakat dalam memanfaatkan sumber.

Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pendekatan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan kontrol atas sumber daya material dan nonmaterial yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan. (Pranarka dan Vidhyandika, 1996) menyatakan bahwa dalam pergeseran aliran pembangunan, pusat perhatian bertumpu pada manusia dan kebutuhannya menurut ukuran mereka sendiri, bukan sebagaimana yang diperkirakan para praktisi pembangunan pada masa lampau. karena itu, desentralisasi penanganan masalah sosial menjadi isu yang sangat penting dalam kurun waktu yang akan datang<sup>9</sup>.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa partisipasi masyarakat dan pemberdayaan yang didasari oleh perbedaan perspektif telah mengantarkan LSM ( Lembaga Sosial Masyarakat) menjadi pusat harapan untuk mengatasi segera kritis akibat dilaksanakannya pembangunan global. LSM telah menjadi karakteristik pendekatan alternatif terhadap kegagalan pembangunan industri dan paternalistik *top-down* terhadap kemiskinan, masalah wanita dan sebagainya di tingkat *grassroot* berskala kecil. Pendekatan ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan sebagai pola potensial dalam strategi alternatif untuk membangun masyarakat itu sendiri. Asumsi dasarnya untuk membangun adalah harus didasarkan pada pemberdayaan masyarakat<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Harry hikmat, 2006, *Strategi pemberdayaan masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama presss, hal: 65

<sup>10</sup> Harry hikmat, 2006, *Strategi pemberdayaan masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama presss, hal:11



### 3. *Ekonomi Development* (Pembangunan Ekonomi)

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya batasan diatas maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkatkan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, berdasarkan definisi di atas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan:

- a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus.
- b. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita.
- c. Kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf Kesejahteraan masyarakat dari suatu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Menurut Arsyad (1997) pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam Kesejahteraan ekonomi masyarakat<sup>11</sup>.

Sesungguhnya pembangunan sosial merupakan respon dari pembangunan ekonomi yang lama mendominasi model-model pembangunan. Pada perkembangan terakhir ini, paradigma pembangunan ekonomi ternyata perlu diimbangi oleh paradigma pembangunan sosial. Para ahli ekonomi telah menyadari bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita, tetapi juga harus melihat bagaimana pendapatan tersebut di distribusikan kepada penduduk secara seimbang, dalam arti siapa yang sesungguhnya mengenyam dan merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut. Berdasarkan analisis ini, pemikiran-pemikiran pembangunan yang konvensional sudah mulai ditunggalkan.

Ada beberapa konsep yang sejalan dengan isu pembangunan sosial antara lain ; Dimensi-dimensi pembangunan sosial meliputi peningkatan produktivitas, pelayanan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial, dan pembangunan masyarakat.

a. Peningkatan Produktivitas

Dimensi ini dapat menjadi area pertemuan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (*humant resources development*).

Dalam konteks pembangunan sosial sekaligus yang membedakan dengan

---

<sup>11</sup> Dr. Mansour Fakih, 2001, *Analisis Gender & transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal:58.

konteks pembangunan ekonomi, terutama adalah dalam hal pengorganisasian.

b. Pelayanan Sosial

Pelayanan Sosial dalam arti luas mencakup beberapa sekitar pembangunan juga, mencakup ruang lingkungan pemberdayaan kesejahteraan rakyat yang merupakan subsistem pembangunan nasional. Dengan demikian, dalam konteks pembangunan sosial, pelayanan sosial ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, pelayan kerja, dan perumahan.

c. Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pelayan Kesejahteraan Sosial merupakan subsistem dari pelayanan Sosial dengan intinya kepada pelayanan Sosial personal dengan sasaran mencakup kelompok-kelompok khusus yang membutuhkan pelayanan sosial, seperti kelompok usia lanjut, anak terlantar, korban ketergantungan obat.

d. Pembangunan Masyarakat

Hakikat pembangunan masyarakat adalah *community base development* atau pembangunan masyarakat dari bawah (*bottom-up*). Ditinjau dari sisi pemerintahan (*geverment*), pembangunan masyarakat merupakan hasil dari perencanaan yang sistematis dari atas yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana subyek pembangunan. Kendati demikian, dalam perencanaan pembangunan masyarakat ada yang menyatakan bahwa masyarakat adalah subyek pembangunan, keterlepasan ikatan ini menjadikan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) lebih leluasa dalam

membangun masyarakat yang pada tataran praktisnya disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat.

### **C. Konsep Partisipasi Perempuan**

#### **1. *Women In Development* ( Perempuan dalam pembangunan )**

*Women In Development* (WID) menjadi bagian diskursus kepada pembangunan, dan merupakan pendekatan dominan bagi pemecahan persoalan perempuan dunia. Gagasan WID dianggap satu-satunya jalan guna memperbaiki status dan nasib berjuta-juta perempuan di negara dunia. Namun setelah kurang lebih sepuluh tahun berjalan, banyak orang mulai menyaksikan dan mengajukan kritik mendasar terhadap konsep WID. Kritik ini dipelopori oleh berbagai aliran feminisme. WID dianggap bagian bagian dari agenda dunia pertama untuk mendominasi Dunia. Konsep WID sendiri dianggap membawa bias feminis liberal, kelas menengah kulit putih, yang dianggap tidak memiliki kepentingan pembebasan kaum perempuan. Dalam tahun 1974, ketika suatu konferensi tentang pengintegrasian perempuan ke dalam ekonomi nasional diselenggarakan di Wesley College, dan biro WID mulai dibuka di USA, saat itulah disiplin ilmu baru tercipta. Sebagian besar literatur mereka sangat praktis, memusatkan perhatian kepada isu-isu yang langsung berkenaan dengan bagaimana mendorong partisipasi perempuan dalam program pembangunan.

Dalam kenyataan sehari-hari peran perempuan sangat besar baik dalam musim tanam, pemeliharaan sampai musim panen tiba. Namun, sejak Revolusi Hijau, dengan diperkenalkan tipe padi baru disertai pengenalan teknologi baru, secara sistematis perempuan tergusur dari peran semula. pengenalan perekonomian uang tunai (*cash Economy*) jelas sangat berpengaruh terutama kepada hubungan buruh

tani dengan istrinya. Pemilik sawah harus mendistribusikan sebagian dari *surplus-value*, di antaranya dalam bentuk pajak, kredit bank, sewa tanah. Para buruh tani yang menjual tenaganya, menerima upah yang sering kali dibawah standar minimum, pada akhirnya diserahkan kepada istrinya, disini terjadi lantas terjadi hubungan eksploitatif karena dengan upah minimum itu perempuan harus mengerjakan tugas-tugas domestik.

Agenda utama program WID (*Woment In Development*) adalah bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan. Asumsinya, penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Pada saat WID lahir, banyak orang telah menilai bahwa gagasan ini sesungguhnya justru lebih menjinakkan dan mengerangkeng (membelenggu) perempuan ketimbang membebaskannya.

Dapat disimpulkan bahwa WID merupakan strategi dan diskursuskan *Developmentalism* untuk melanggengkan dominan dan penindasan perempuan didunia, melalui upaya penjinakan (*Cooptstion*) dan pengekangan (*regulation*) perempuan. Pada dasarnya menghindari upaya emansipasi. Oleh karena itu WID diragukan mampu memacu proses transformasi.

Tujuan gerakan transformasi gender tidak sekedar memperbaiki status perempuan yang indikatornya menggunakan norma laki-laki, melainkan memperjuangkan martabat dan kekuatan perempuan. Hal tersebut membutuhkan perubahan peran balik perempuan maupun laki-laki. Dalam hal ini kekuatan bukan berarti mendominasi yang lain. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan internal, dalam rangka mengontrol hidup, juga kemampuan meraih akses terhadap alokasi sumber-sumber material dan nonmaterial.

Transformasi gender menolak integrasi perempuan ke dalam *Developmentalims*. Karena tujuan pengintegrasian perempuan tidak memberikan pilihan dan suara untuk mempertahankan kehidupan seperti yang diidamkan oleh kaum perempuan<sup>12</sup>

#### 1. Partispasi Perempuan

Dengan diciptakannya wadah/organisasi bagi perempuan Indonesia dan telah digariskan bentuk-bentuk peran perempuan dalam pembangunan, maka pemerintah dengan demikian mengharapkan peran perempuan dalam pembangunan sosial dapat meningkat. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dalam hal ini. Pertama, ketika peran perempuan dalam pembangunan dapat ditingkatkan, bagaimana perlakuan pembangunan sosial terhadap perempuan itu sendiri? Artinya apakah dengan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan sosial, maka kaum perempuan juga memperoleh reward dari pembangunan sosial yang didukung oleh kelompok perempuan itu? Pertanyaan lain adalah apakah rekayasa sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan sosial itu menegakkan otonomi perempuan Indonesia atau sebaliknya justru meletakkan perempuan Indonesia di bawah penindasan lama yakni kaum pria?

Disamping itu dalam realita kehidupan kelompok perempuan bukan lagi merupakan nilai yang mereka hayati. Para perempuan bali umpamanya tidak

---

<sup>12</sup> Dr. Mansour Fakir, 2002, *Gender Dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Puataka Pelajar, hal : 197.

merasa rihuk mengerjakan pekerjaan yang dari segi kodrat tidak layak dilakukan oleh seorang perempuan umpamanya bekerja sebagai kuli bangunan. Oleh karena itu, pelestarian konsep kodrat sebagai dasar kebijakan pengembangan kehidupan. Situasi akan berbeda apabila kita lihat pada sektor pertanian. Saya yakin peranan perempuan dalam pembangunan cukup memadai. Tanpa kerja keras dan pengorbanan perempuan Indonesia maka tidak mungkin Indonesia mencapai swasembada pangan. Di Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dapat dikatakan bahwa mayoritas kader kesehatan di daerah pedesaan adalah perempuan. Demikian pula apabila karya ibu-ibu rumah tangga yang dengan penuh kesabaran dan pengorbanan dalam membina keluarga mereka diakui sebagai kontribusi perempuan dalam pembangunan sosial, maka tidak terkira besarnya kontribusi kaum perempuan dalam pembangunan Indonesia<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Loekman Sutrisno, 1997, *Kemiskinan, Perempuan, pemberdayaan*, Yogyakarta: Kalisius, hal : 68.